BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Objek penelitian dalam hal ini adalah pejabat struktural SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuisioner sebagai data primer.

Tabel 4.1
Daftar Unit SKPD

No	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah	Alamat
1	Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika	Jl. Lintas Timur No.2 Pandeglang
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jl. Jendral Sudirman Cikupa Pandeglang
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jl. Raya Labuan Km.2 Ciekek Pandeglang
4	Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset	Jl. Lintas Timur Karang Tanjung
5	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Raya Serang No.5.A Pandeglang
6	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Graha Pancasila No.2 Pandeglang
7	Dinas Kesehatan	Jl. Bayangkara No.3 Pandeglang
8	Dinas Peternakan	Jl. Jendral Sudirman Cikupa Pandeglang
9	Dinas Koperasi dan UKM	Jl. Yusuf Martadinata Pandeglang
10	Dinas Tata Ruang dan Pertamanan	Jl. Bayangkara No.2 Pandeglang
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Bayangkara No.3 Pandeglang
12	Dinas Kehutanan	Jl. Lintas Timur AMD Karang Tanjung
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jl. Stadion Badak Pandeglang No.1
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. KH.TB Abdul Halim Pandeglang
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Jl. Rara Mayor Widagdo No.10 Pandeglang

4.1.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten Indonesia, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan disebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil. Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa.

Luas wilayahnya 2.747 km², dan jumlah penduduknya 1,585 juta jiwa (2008). Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Pandeglang, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten, Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua kota yakni Kota Pandeglang dan Labuan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang. Kawasan selatan terdapat rangkaian pegunungan. Sungai yang mengalir diantaranya Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat, dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan.

Menurut sejarah pada tahun 1089 Banten terpaksa harus menyerahkan wilayahnya yaitu Lampung kepada *VOC* (Batavia). Saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Muhamad menyusun strategi untuk melawan kekuasaan *VOC*. Sultan Muhamad menjadikan Pandeglang sebagai wilayah untuk menyusun kekuatan. Kekuatan kesultanan dipencar ke pelosok Pandeglang seperti di kaki gunung karang dan di pantai.

Pandeglang dalam percaturan sejarah Kesultanan Banten telah terbukti merupakan daerah yang strategis. Hal ini bisa terlihat dari berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah Pandeglang. Semua itu tidak hanya membekas pada benda yang berwujud tetapi juga membekas pada kultur kehidupan masyarakat Pandeglang. Peninggalan sejarah Kesultanan Banten nampak dari seni budaya yang ada di Pandeglang. Misalnya, Pandeglang merupakan kota santri sebagai daerah historis, patriotis dan agamis. Julukan ini tidak serta merta timbul dengan sendirinya akan tetapi karena bentangan sejarah telah mencatatnya.

Berdasarkan *staatsblad* 1874 No. 73 ordonansi tanggal 1 Maret 1874 mulai berlaku 1 April 1874 menyebutkan pembagian daerah, diantaranya Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 9 (Sembilan) distrik atau kewedanan. Pembagian ini menjadi Kewedanan Pandeglang, Baros, Ciomas, Kolelet, Cimanuk, Caringin, Panimbang, Menes dan Cibaliung. Menurut data di atas, Pandeglang sejak tanggal 1 April 1874 telah ada pemerintahan. Lebih jelas lagi dalam *ordonansi* 1877 Nomor 224 tentang batasbatas keresidenan Banten, termasuk batas-batas Kabupaten Pandeglang dalam Tahun 1925 Nomor XI. Maka jelas Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri tidak di bawah penguasaan Keresidenan Banten.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan, yaitu pada Tahun 1828 Pandeglang sudah merupakan pusat pemerintahan distrik. Pada Tahun 1874 Pandeglang merupakan kabupaten. Pada Tahun 1882 Pandeglang merupakan kabupaten dan distrik kewedanan. Pada Tahun 1925 Kabupaten Pandeglang telah

berdiri sendiri. Maka pada Tanggal 1 April 1874 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pandeglang.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain. Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi sehingga usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Kepala Dinas membawahkan sekretaris dan 6 (lima) bidang, yaitu:
    a. Sekretariat
    b. Bidang Pendataan dan Penetapan.
    c. Bidang Anggaran.
    d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
    e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
    f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
2. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subagian, yaitu :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    b. Sub Bagian Keuangan.
    c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

3. Bidang Pendapatan dan Penetapan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
    a. Seksi Pendapata dan Penetapan.
    b. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
    c. Seksi penetapan dan keberatan.
4. Bidang Anggaran, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
    a. Seksi Perencanaan Anggaran.
    b. Seksi Anggaran Penerimaan.
    c. Seksi Anggaran Pengeluaran.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
    a. Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan.
    b. Seksi Pembendaharaan Penerimaan.
    c. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
    a. Seksi Pelaporan dan Verifikasi.
    b. Seksi Akuntansi Penerimaan.
    c. Seksi Akuntansi Pengeluaran.
7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
    a. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak.
    b. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.1.3 Deskripsi Jabatan

Dengan adanya penjelasan deskripsi jabatan dari tiap bidang yang ada dalam struktur organisasi maka akan dapat mempermudah, dalam memahami dan mengetahui penjabaran tugas masing-masing.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, pengendalian kegiatan di bidang urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian, dan menyelenggarakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan. Dimana Bagian Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja sekretaris Pengelolaan adminiatrasi umum dan perlengkapan, keuangan kepegawaian.
b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas bidang

3. Bidang Pendapatan

Tugas pokok dan kewajiban Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan petunjuk teknis pendataan, penetapan dan penerimaan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan dan melakukan pemungutan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.
b. Penyusunan perencanaan bidang pendapatan.
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pendataan dan penetapan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan dan melakukan pemungutan pajak dan pendapatan daerah.
d. Penyelenggaraan pendataan dan penetapan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan dan melakukan pemungutan pajak dan pendapatan daerah.
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan dan melakukan pemungutan pajak dan pendapatan daerah.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan Pengendalian kegiatan dibidang perencanaan , penyusunan dan pengendalian anggaran. Uraian tugas bidang anggaran seperti berikut :

a. Penyusunan program kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai bahan pedoman kerja.
b. Penjabaran perintah dan kebijakan atasan melalui pengkajian permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Pendistribusian tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan pemberian petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Pelaksanaa kordinasi bidang tugasnya dengan sekretaris, bidang lingkungan dinas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk pengevaluasian permasalahan guna mencapai hasil yang optimal.
e. Pemonitoran dan evaluasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perkembangan dan sebagai bahan perumusan kebibjakan atasan.
f. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan bidang perencanaan penyusunan dan pengendalian anggaran.
g. Penyusunan konsep rencana belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung berdasarkan data dari satuan kerja perangkat daerah, dalam rangka penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
h. Persiapan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta

lampirannya dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dikirim ke dewan untuk pembahasan lebih lanjut.

i. Persiapan penyusunan rancangan Perda dan keputusan Walikota tentang pelaksanaan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
j. Pelaksanaan monitoring, pengevaluasian dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
k. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan.
l. Penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengujian dan analisis terhadap dokumen permintaan pembayaran serta pengelolaan terhadap kas daerah. Uraian tugas bidang perbendaharaan dan kas daerah meliputi fungsi sebagai berikut :

a. Penyusun program kegiatan bidang Perbendaharaan dan Kas.
b. Penyusun konsep peraturan, keputusan, edaran serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bupati dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Perumusan petunjuk teknis tentang perbendaharaan dan kas untuk dasar pelayanan bagi para petugas dan bawahan.
d. Penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
e. Pelaksanaa koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang dilingkungan dinas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal.
f. Penginventarisasi permasalahan bidang perbendaharaan dang anti rugi serta mengkoordinasi penyelesaiannya.
g. Penyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lesan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
i. Pelaksanakan tugas kedinasan lain berdasar perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi informasi akuntansi, melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunayai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam hal :

a. Pembinaan teknik oprasional pada petugas lapangan.
b. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang akuntansi dan pelaporan.

c. Penyusunan rencana kerja rencan kerja bidang akuntansi dan pelaporan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunayai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penilaian, pemberdayaan serta penatausahaan asset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset mempunyai fungsi :

f. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan aset daerah.

g. Penyusunan perencanaan pengelolaan aset daera.

h. .Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan aset daerah mengenai tata cara perhitungan kebutuhan dan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, distribusi, pemanfaatan dan penghapusan aset daerah.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan Instansi

Secara keseluruhan setiap instansi yang ada memiliki tugas pokonya masing-masing yaitu melaksanakan urusan pemerintahan derah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidangnya masing-masing yaitu sebagi berikut :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berfungsi untuk membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas, pemberian perizinan rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai ruang lingkup tugasnya dan pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja perangkat daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan peyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
3. Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pokok membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah dan membuat perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian dibidang teknis kebinamargaan.
4. Dinas Perhubungan dan Informatika mempunyai fungsi dalam menyusun rencana strategis dan akuntabilitas dilingkungan dinas, merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan dinas, dan melaksanakan tugas dinas Lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya

5. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi dalam penyusunan perencanaan dan program serta melaksanakan evaluasi dibidang perikanan dan kelautan, memberikan pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap dan pengelolaan urusan ketatausahaan.
6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah, membuat perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan membuat perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan ketenagakerjaan.
7. Dinas Koperasi dan UKM memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UKM, melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan UKM, dan melakukan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8. Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan, melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan dan melaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
9. Dinas Petrnakan memiliki togas pokok dalam membuat penyusunan program kerja di bidang peternakan, kesehatan hewan, membuat perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan melakukan penyelenggara

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan.

10. Dinas Tata Ruang dan Pertamanan memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pertamanan, melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, pertamanan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
12. Dinas Kehutanan memiliki fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerahberdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dii bidang kehutanan.
13. Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi dalam menyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas olahraga dan pemuda, membuat perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keolahragaan dan kepemudaan.

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata dan melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata.
15. Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki tugas pokok dalam membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pertania dan perkebunan, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan perkebunan dan melaksanakan pembinaan tugas dibidang pertanian dan perkebunan.

4.1.2 Pengujian Alat Analisis

4.1.2.1 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pertanyaan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pertanyaan item yang ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product Moment.* Apabila nilai koefisien korelasi butir item pertanyaan yang sedang diuji lebih besar dari r-kritis sebesar 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan tersebut merupakan konstruksi (*construct*) yang

valid. Adapun hasil uji validitas kuesioner kedua variabel yang diteliti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas
Variabel Partisipasi Anggaran (X_1)

Item Pernyataan	Koefisien Validitas	R Kritis	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.748	0.300	Valid
Pernyataan 2	0.764	0.300	Valid
Pernyataan 3	0.832	0.300	Valid
Pernyataan 4	0.599	0.300	Valid
Pernyataan 5	0.842	0.300	Valid
Pernyataan 6	0.527	0.300	Valid

(Sumber:Data promer yang diolah)

Tabel 4.6
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas
Variabel Pengawasan Intern (X_2)

Item Pernyataan	Koefisien Validitas	R Kritis	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.624	0.300	Valid
Pernyataan 2	0.553	0.300	Valid
Pernyataan 3	0.594	0.300	Valid
Pernyataan 4	0.486	0.300	Valid
Pernyataan 5	0.657	0.300	Valid
Pernyataan 6	0.636	0.300	Valid
Pernyataan 7	0.506	0.300	Valid
Pernyataan 8	0.657	0.300	Valid

(Sumber:Data promer yang diolah)

Tabel 4.7
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas
Variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

Item Pernyataan	Koefisien Validitas	R Kritis	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.492	0.300	Valid
Pernyataan 2	0.701	0.300	Valid
Pernyataan 3	0.314	0.300	Valid
Pernyataan 4	0.465	0.300	Valid
Pernyataan 5	0.750	0.300	Valid
Pernyataan 6	0.669	0.300	Valid
Pernyataan 7	0.718	0.300	Valid
Pernyataan 8	0.604	0.300	Valid

(Sumber:Data promer yang diolah)

Pada ketiga tebel diatas terlihat bahwa nilai koefisien validitas setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai kritis 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada masing-masing variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang termasuk dalam kategori *valid.* Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *Split Half Method*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *reliabilitas* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,60. Adapun hasil dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	R Kritis	Kesimpulan
Partisipasi Penganggaran (X1)	0.756	0.600	Reliabel
Partisipasi Penganggaran (X1)	0.856	0.600	Reliabel
Kinerja unit satuan kerja perangkat daerah (Y)	0.709	0.600	Reliabel

Sumber:Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai reliabilitas butir pertanyaan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,60 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir peryataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.

4.1.2.3 Profil Responden

Data responden dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang responden yang dapat dijadikan masukan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, adapun responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebanyak 64 responden dan analisis deskriptif data responden ini terdiri atas 7 tabel tunggal dengan data sebagai berikut:

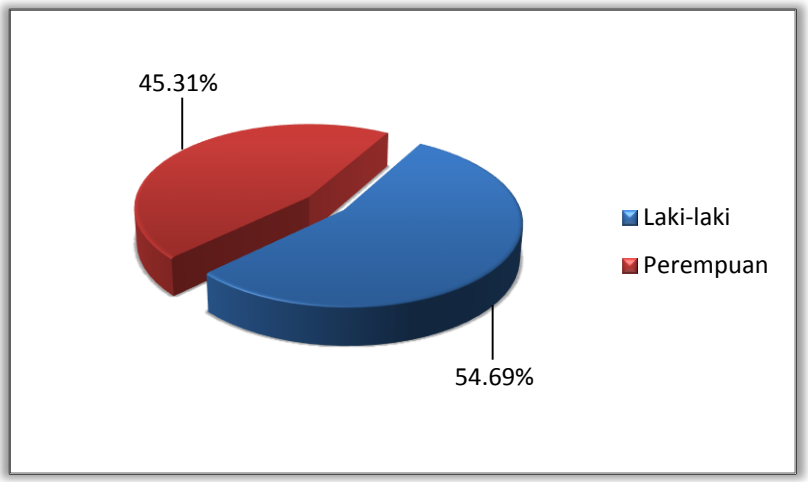
a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Berikut Profil responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	35	54.69%
2	Perempuan	29	45.31%
Total		**64**	**100.00%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2013



Gambar 4.1 Gambaran Banyaknya Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.5 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan Jenis Kelamin. Mayoritas responden sebanyak 35 orang atau 54.69% adalah responden yang berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya adalah responden yang berjnis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 29 orang atau 45.31%. Hal tersebut menggambarkan pada setiap unit satuan kerja perangkat daerah yang ada, jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan, jumlah responden laki-laki lebih banyak karena mungkin lebih mampu untuk memimpin dan menjalankan tugas disetiap unit satuan kerja dan bidang masing-masing.

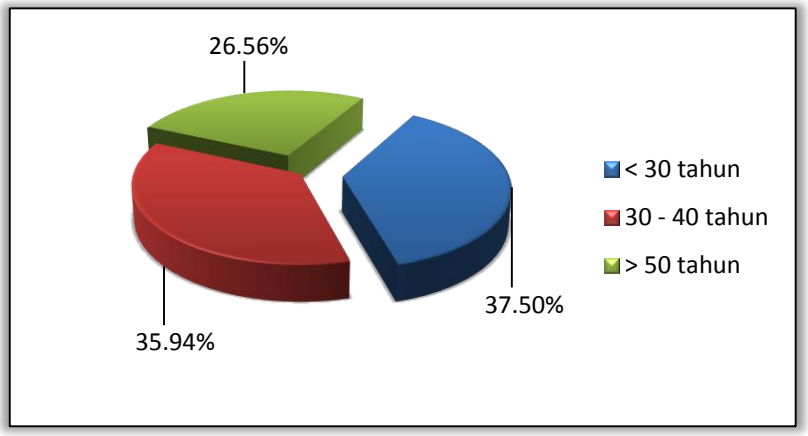
b. Profil Berdasarkan Umur Responden

Profil responden berdasarkan umur dapat dilihat pada table dibawah ini yaitu sebagi berikut :

Tabel 4.3
Gambaran Banyaknya Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1	< 30 tahun	24	37.50%
2	30 - 40 tahun	23	35.94%
3	> 50 tahun	17	26.56%
Total		**64**	**100.00%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013



Gambar 4.2 Gambaran Banyaknya Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.6 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan Umur. Mayoritas responden sebanyak 24 orang atau 37.50% adalah responden yang berusia kurang dari 30 tahun dan minoritas adalah responden yang berusia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau 26.56%. Hal tersebut menunjukan bahwa banyaknya

responden yang berumur 30 tahun, dikarenakan pada usia umur 30 hingga 40 tahun masih termasuk dalam usia produktif yang mampu menjalankan tugas dengan baik.

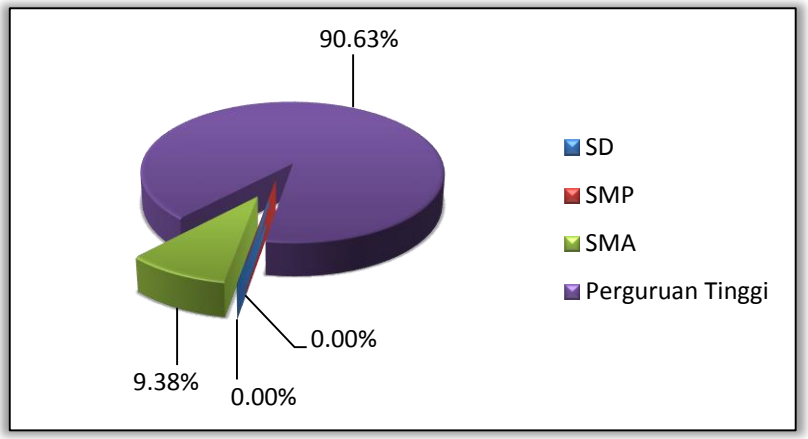
c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Profil responden berdasrkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SD	0	0.00%
2	SMP	0	0.00%
3	SMA	6	9.38%
4	Perguruan Tinggi	58	90.63%
Total		**64**	**100.00%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013



Gambar 4.3 Gambaran Banyaknya Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.7 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan Pendidikan Terakhir. Mayoritas responden sebanyak 58 orang atau 90.63% adalah responden

yang berpendidikan sampai Perguruan Tinggi dan sisanya adalah responden yang berpendidikan sampai SMA yaitu sebanyak 6 orang atau 9.38. Berdasarkan data tersebut banyak responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, karena adanya tuntutan untuk tingkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan jabatan yang akan dipegang, hal ini menyebabkan responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi lebih banyak bila dibandingkan dengan respondeng dengan tingkat pendidikan lain.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Teknik analisis deskriptif data penelitian bertujuan untuk menjelaskan mengenai keseluruhan data yang dikumpulkan dengan memaparkan, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan ke dalam tabel yang kemudian diberi penjelasan satu persatu. Data penelitian ini diperoleh peneliti dari jawaban responden atas sejumlah pertayaan. Jawaban-jawaban responden dari pernyataan di dalam angket mendukung penelitian, dan setiap jawaban yang dipilih responden diberi nilai antara satu (1) sampai dengan lima (5) yang kemudian dikumulatifkan.

4.1.3.1 Variabel Partisipasi Penganggaran (X_1)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Partisipasi Penganggaran (X_1), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 64 responden dan 6 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

= 64 x 6 x 5

= 1920

Persetase = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$

$= \frac{1370}{1920} \times 100\%$

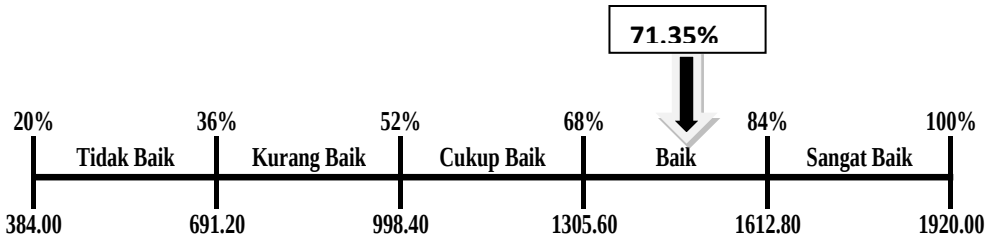
= 71.35%

Dengan interval skor yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka untuk menentukan masing-masing kategori variabel Partisipasi Penganggaran (X_1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Variabel Partisipasi Penganggaran (X_1)

Indikator	n	k	Total Skor	Skor Ideal	Persentase	Kategori
Keterlibatan dalam penyusunan anggaran	64	2	488	640	76,25%	Baik
Pengaruh dalam penentuan besar anggaran	64	2	432	640	67,50%	Cukup Baik
Kontribusi dalam penyusunan anggaran	64	2	450	640	70,31%	Baik
Total	**64**	**6**	**1370**	**1920**	**71,35%**	**Baik**

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya persentase dipetakan ke dalam kategori standar kriteria objektif yang telah ditentukan sebagai berikut:



Pembahasan diatas merupakan gambaran responden mengenai variabel Partisipasi Penganggaran (X_1) yang terdiri atas 6 item pernyataan. Skor kumulatif adalah sebesar 1370 atau 71.35% dari skor ideal 1920 dan termasuk dalam kategori Baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, responden memiliki persepsi yang Baik tentang Partisipasi Penganggaran (X_1) Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran jawaban dari 64 responden untuk item-item pernyataan pada variabel Partisipasi Penganggaran ((X_1) di bawah ini.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Sering	5	12	60	18,75%
2	Sering	4	26	104	32,50%
3	Kadang-kadan	3	23	69	21,56%
4	Tidak Pernah	2	3	6	1,88%
5	Sangat Tidak Pernah	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**239**	**74,69%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran". Mayoritas responden

sebanyak 26 orang atau 40.63% adalah responden yang menjawab “Sering”, dan minoritas responden yang menjawab “Tidak Pernah” yaitu sebanyak 3 orang atau 4.69%. Dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang sering ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Kategori manakah yang menjelaskan keterlibatan dalam proses penyusunan, termasuk penetapan anggaran."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	x_i . f_i	Persentase (%)
1	Semua Anggaran	5	12	60	18,75%
2	Hanya Sebagian	4	39	156	48,75%
3	Hanya Sesekali	3	9	27	8,44%
4	Hampir Tidak Pernah	2	2	4	1,25%
5	Tidak Satupun Angggaran	1	2	2	0,63%
Total			**64**	**249**	**77,81%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Kategori yang menjelaskan keterlibatan dalam proses penyusunan, termasuk penetapan anggaran.” Mayoritas responden sebanyak 39 orang atau 60.94% adalah responden yang menjawab “Hanya Sebagian”, dan minoritas responden yang menjawab “Hampir Tidak Pernah dan Tidak Satupun Angggaran” yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau 3.13%. Dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang mengikuti hanya sebagian anggaran dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran akhir.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Pengaruh dalam proses penentuan besarnya anggaran."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Besar	5	2	10	3,13%
2	Besar	4	12	48	15,00%
3	Sedang	3	31	93	29,06%
4	Kecil	2	14	28	8,75%
5	Sangat Kecil	1	5	5	1,56%
Total			**64**	**184**	**57,50%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Pengaruh dalam proses penentuan besarnya anggaran.". Mayoritas responden sebanyak 31 orang atau 29.06% adalah responden yang menjawab "Sedang", dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Besar" yaitu sebanyak 2 orang atau 3.13%. Disimpulkan bahwa responden memiliki pengaruh yang biasa saja atau sedang ketika dalam proses penentuan basarnya anggaran.

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Dalam penentuan besaran anggaran akhir, pandangan terhadap pengaruh yang diberikan dalam penetapan anggaran akhir."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Penting	5	12	60	18,75%
2	Penting	4	33	132	41,25%
3	Biasa Saja	3	18	54	16,88%
4	Tidak Penting	2	1	2	0,63%
5	Sangat Tidak Penting	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**248**	**77,50%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Dalam penentuan besaran anggaran akhir, pandangan terhadap pengaruh yang diberikan dalam penetapan anggaran akhir.". Mayoritas responden sebanyak 33 orang atau 41.25% adalah responden yang menjawab "Penting", dan minoritas responden yang menjawab "Tidak Pernah" yaitu sebanyak 1 orang atau 0.63%. Dapat disimpulkan bahwa responden memeberikan pengaruh yang penting pada saat penetapan anggaran akhir.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
" Kontribusi pada saat penyusunan anggaran."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Besar	5	6	30	9,38%
2	Besar	4	13	52	16,25%
3	Sedang	3	33	99	30,94%
4	Kecil	2	10	20	6,25%
5	Sangat Kecil	1	2	2	0,63%
Total			**64**	**203**	**63,44%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Kontribusi pada saat penyusunan anggaran.". Mayoritas responden sebanyak 33 orang atau 30.94% adalah responden yang menjawab "Sedang", dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Kecil" yaitu sebanyak 2 orang atau 0.63%. dapat disimpulkan banyak responden memiliki kotribusi yang biasa saja atau sedang pada saat penyusunan anggaran.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Pandangan terhadap kontribusi yang diberikan dalam proses penyusunan anggaran."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Penting	5	8	40	12,50%
2	Penting	4	39	156	48,75%
3	Biasa Saja	3	17	51	15,94%
4	Tidak Penting	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Penting	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**247**	**77,19%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Bagaimana Bapak/Ibu memandang kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyusunan anggaran.". Mayoritas responden sebanyak 39 orang atau 48.75% adalah responden yang menjawab "Penting", dan minoritas responden yang menjawab "Sangat Penting" yaitu sebanyak 8 orang atau 12.50%. Dapat disimpulkan bahwa responden memberikan kontribusi yang penting pada proses penyusunan anggaran.

4.1.3.2 Variabel Pengawasan Intern (X_2)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Pengawasan Intern (X_2), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 64 responden dan 8 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

= 64 x 8 x 5

= 2560

Persetase = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$

= $\frac{2051}{2560} \times 100\%$

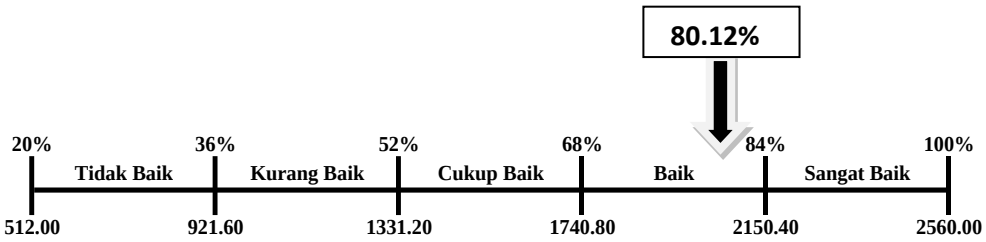
= 80.12%

Dengan interval skor yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka untuk menentukan masing-masing kategori variabel Pengawasan Intern (X_2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Variabel Pengawasan Intern (X_2)

Indikator	n	k	Total Skor	Skor Ideal	Persentase	Kategori
Menjaga kekayaan organisasi	64	2	502	640	78,44%	Baik
Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi	64	2	517	640	80,78%	Baik
Mendorong efisiensi	64	2	517	640	80,78%	Baik
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen	64	2	515	640	80,47%	Baik

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya persentase dipetakan ke dalam kategori standar kriteria objektif yang telah ditentukan sebagai berikut:



Pembahasan diatas merupakan gambaran responden mengenai variabel Pengawasan Intern (X_2) yang terdiri atas 8 item pernyataan. Skor kumulatif adalah sebesar 2051 atau 80.12% dari skor ideal 2560 dan termasuk dalam kategori Baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, responden memiliki persepsi yang Baik tentang Partisipasi Pengawasan Intern (X_2). Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran jawaban dari 64 responden untuk item-item pernyataan pada variabel Pengawasan Intern (X_2) yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Kategori yang menjelaskan fungsi dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kekayaan organisasi."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Penting	5	17	85	26,56%
2	Penting	4	40	160	50,00%
3	Biasa Saja	3	7	21	6,56%
4	Tidak Penting	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Penting	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**266**	**83,13%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Kategori manakah yang menjelaskan fungsi dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kekayaan organisasi.". Mayoritas responden sebanyak 40

orang atau 50.00% adalah responden yang menjawab “Penting”, dan minoritas responden yang menjawab “Biasa Saja” yaitu sebanyak 7 orang atau 6.56%. Disimpulkan bahwa pengawasan penting dilakukan untuk menjaga kekayaan organisasi.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Melakukan pengawasan untuk menjaga aset organisasi."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Sering	5	9	45	14,06%
2	Sering	4	27	108	33,75%
3	Biasa Saja	3	27	81	25,31%
4	Tidak Penting	2	1	2	0,63%
5	Sangat Tidak Penting	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**236**	**73,75%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Melakukan pengawasan untuk menjaga aset organisasi.”. Mayoritas responden sebanyak 27 orang atau 33.75% adalah responden yang menjawab “Sering dan “Kadang-kadang”, dan minoritas responden yang menjawab “Tidak Pernah” yaitu sebanyak 1 orang atau 0.63%. Dapat disimpulkan banyak responden yang sering melakukan pengawasan untuk menjaga asset organisasi.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Melakukan pemeriksaan dan mengecek ketelitian data akuntansi."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Sering	5	13	65	20,31%
2	Sering	4	23	92	28,75%
3	Biasa Saja	3	25	75	23,44%
4	Tidak Penting	2	3	6	1,88%
5	Sangat Tidak Penting	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**238**	**74,38%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Melakukan pemeriksaan dan mengecek ketelitian data akuntansi.”. Mayoritas responden sebanyak 25 orang atau 23.75% adalah responden yang menjawab “Kadang-kadang”, dan minoritas responden yang menjawab “Tidak Pernah” yaitu sebanyak 3 orang atau 1.88%. Dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang sering melakukan pemeriksaan dan mengecek ketelitian data akuntansi agar laporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 4.20
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
" Harus benar-benar memahami ilmu akuntansi."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	27	135	42,19%
2	Setuju	4	33	132	41,25%
3	Biasa Saja	3	4	12	3,75%
4	Tidak Setuju	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**279**	**87,19%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Harus benar-benar memahami ilmu akuntansi.”. Mayoritas responden sebanyak 33 orang atau 41.25% adalah responden yang menjawab “Setuju”, dan minoritas responden yang menjawab “Biasa Saja” yaitu sebanyak 4 orang atau 3.75%. Dapat disimpulkan bahwa responden setuju dalam melakukan pengawasan terhadap ketelitian dan keandalan data akuntansi, maka harus benar-benar memahami ilmu akuntansi.

Tabel 4.21
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Kategori manakah yang menggambarkan tingkat kemampuan dalam mendorong dan meningkatkan efisiensi suatu program kegiatan."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Tinggi	5	7	35	10,94%
2	Tinggi	4	29	116	36,25%
3	Sedang	3	27	81	25,31%
4	Rendah	2	1	2	0,63%
5	Sangat Rendah	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**234**	**73,13%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Kategori yang menggambarkan tingkat kemampuan responden dalam mendorong dan meningkatkan efisiensi suatu program kegiatan.”. Mayoritas responden sebanyak 29 orang atau 36.25% adalah responden yang menjawab “Tinggi”, dan minoritas responden yang menjawab “Rendah” yaitu sebanyak 1 orang atau 0.63%. Dapat disimpulkan bahwa responden kemampuan yang tinggi dalam mendorong dan meningkatkan efisiensi suatu program kegiatan.

Tabel 4.22
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Pembagian tanggung jawab antar sub-sub bagian dalam suatu organisasi, diperuntukan untuk meningkatkan efisensi dalam suatu kegiatan organisasi."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	27	135	42,19%
2	Setuju	4	37	148	46,25%
3	Ragu-ragu	3	0	0	0,00%
4	Tidak Setuju	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**283**	**88,44%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Pembagian tanggung jawab antar sub-sub bagian dalam suatu organisasi, diperuntukan untuk meningkatkan efisensi dalam suatu kegiatan organisasi.". Mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 57.81% adalah responden yang menjawab "Setuju", dan sisanya responden yang menjawab "Sangat Setuju" yaitu sebanyak 27 orang atau 42.19%. Dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan andanya pembagian tanggung jawab antar sub-sub bagian untuk meningkatkan efisiensi.

Tabel 4.23
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
" **Pengawasan dilakukan dengan baik, mendorong dipatuhinya kebijakan** ."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	30	150	46,88%
2	Setuju	4	34	136	42,50%
3	Ragu-ragu	3	0	0	0,00%
4	Tidak Setuju	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**286**	**89,38%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Pengawasan yang dilakukan dengan baik, akan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan”. Mayoritas responden sebanyak 34 orang atau 42.50% adalah responden yang menjawab “Setuju”, dan sisanya responden yang menjawab “Sangat Setuju” yaitu sebanyak 30 orang atau 46.88%. Dapat dismpulkan bahwa responden setuju dengan adanya pengawasan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tabel 4.24
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Kategori yang menggambarkan kontribusi dalam mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Besar	5	9	45	14,06%
2	Besar	4	20	80	25,00%
3	Sedang	3	34	102	31,88%
4	Rendah	2	1	2	0,63%
5	Sangat Rendah	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**229**	**71,56%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Kategori yang menggambarkan kontribusi dalam mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.”. Mayoritas responden sebanyak 34 orang atau 31.88% adalah responden yang menjawab “Sedang”, dan minoritas responden yang menjawab “Rendah” yaitu sebanyak 1 orang atau 0.63%. Disimpulkan bahwa responden memiliki kontribusi yang biasa saja atau sedang dalam mendorong dipatuhinya kebijakan mananjemen yang telah ditetapkan.

4.1.3.3 Variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y), maka dilakukan pengkategorian dengan cara menjumlahkan skor jawaban dari 64 responden dan 8 pernyataan. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

= 64 x 8 x 5

= 2560

$$\text{Persetase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{2128}{2560} \times 100\%$$

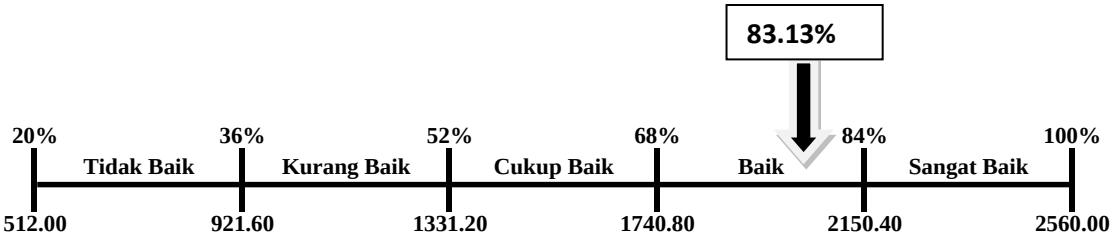
= 83.13%

Dengan interval skor yang telah ditentukan pada bab sebelumnya, maka untuk menentukan masing-masing kategori variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25
Variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

Indikator	n	k	Total Skor	Skor Ideal	Persentase	Kategori
Akuntabilitas	64	2	534	640	83,44%	Baik
Efisiensi	64	2	541	640	84,53%	Sangat Baik
Efektifitas	64	2	538	640	84,06%	Sangat Baik
Keadilan	64	2	515	640	80,47%	Baik
Total	**64**	**8**	**2128**	**2560**	**83,13%**	**Baik**

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya persentase dipetakan ke dalam kategori standar kriteria objektif yang telah ditentukan sebagai berikut:



Pembahasan diatas merupakan gambaran responden mengenai variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) yang terdiri atas 8 item pernyataan. Skor kumulatif adalah sebesar 2128 atau 83.13% dari skor ideal 2560 dan termasuk dalam kategori Baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, responden memiliki persepsi yang baik tentang Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y). Secara detail, kondisi ini dapat dijelaskan melalui penyajian sebaran jawaban dari 64 responden untuk item-item pernyataan pada variabel Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) di bawah ini.

Tabel 4.26
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Pertanggungjawaban kepada publik, mengenai program kegiatan yang telah dilaksanakan."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	14	70	21,88%
2	Baik	4	48	192	60,00%
3	Biasa Saja	3	2	6	1,88%
4	Tidak Baik	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**268**	**83,75%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Pertanggungjawaban kepada publik mengenai program kegiatan yang telah dilaksanakan”. Mayoritas responden sebanyak 48 orang atau 60.00% adalah responden yang menjawab “Baik”, dan minoritas responden yang menjawab “Biasa Saja” yaitu sebanyak 2 orang atau 1.88%. Disimpulkan bahwa pertanggung jawaban kepada publik atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4.27
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Untuk memberikan kepercayaan kepada publik, Pandangan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	5	14	70	21,88%
2	Sesuai	4	46	184	57,50%
3	Biasa Saja	3	4	12	3,75%
4	Tidak Sesuai	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Sesuai	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**266**	**83,13%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Untuk memberikan kepercayaan kepada publik, Pandangan Bapak/Ibu terhadap kebijakan-kebijakan yang ada”. Mayoritas responden sebanyak 46 orang atau 57.50% adalah responden yang menjawab “Sesuai”, dan minoritas responden yang menjawab “Biasa Saja” yaitu sebanyak 4 orang atau 3.75%. Disimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan kepentingan publik.

Tabel 4.28
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, dalam menunjang program kegiatan yang telah ditetapkan."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	8	40	12,50%
2	Baik	4	54	216	67,50%
3	Biasa Saja	3	2	6	1,88%
4	Tidak Baik	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**262**	**81,88%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan "Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, dalam menunjang program kegiatan yang telah ditetapkan.". Mayoritas responden sebanyak 54 orang atau 67.50% adalah responden yang menjawab "Baik", dan minoritas responden yang menjawab "Biasa Saja" yaitu sebanyak 2 orang atau 1.88%. Disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya yang ada untuk menunjang program kegiatan telah dilakukan dengan baik.

Tabel 4.29
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Untuk melihat tingkat efisiensi dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, maka harus adanya perbandingan antara pencapaian dengan pengeluaran."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	23	115	35,94%
2	Setuju	4	41	164	51,25%
3	Ragu-ragu	3	0	0	0,00%
4	Tidak Setuju	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**279**	**87,19%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Untuk melihat tingkat efisiensi dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, maka harus adanya perbandingan antara target dan hasil pencapaiannya”. Mayoritas responden sebanyak 41 orang atau 51.25% adalah responden yang menjawab “Setuju”, dan sisanya responden yang menjawab “Sangat Setuju” yaitu sebanyak 23 orang atau 35.94%. Dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan mambandingkan hasil yang dicapai dengan pengeluaran program kerja merupakan cara untuk melihat tingkat efisiensi dari suatu organisasi publik.

Tabel 4.30
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Pencapaian target dari tujuan organisasi yang telah dijalankan."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	11	55	17,19%
2	Baik	4	48	192	60,00%
3	Biasa Saja	3	5	15	4,69%
4	Tidak Baik	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**262**	**81,88%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Pencapaian target dari tujuan organisasi yang telah dijalankan.”. Mayoritas responden sebanyak 48 orang atau 60.00% adalah responden yang menjawab “Baik”, dan minoritas responden yang menjawab “Biasa Saja” yaitu sebanyak 5 orang atau 4.69%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target dari tujuan organisasi htelah tercapai dengan baik

Tabel 4.31
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Membandingkan hasil yang telah direncanakan dengan hasil yang dicapai, merupakan cara untuk mengetahui tingkat ke efektifan fungsi instansi."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Penting	5	23	115	35,94%
2	Penting	4	38	152	47,50%
3	Biasa Saja	3	3	9	2,81%
4	Tidak Penting	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Penting	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**276**	**86,25%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan tersebut mayoritas responden sebanyak 38 orang atau 47.50% adalah responden yang menjawab "Penting", dan minoritas responden yang menjawab "Biasa Saja" yaitu sebanyak 3 orang atau 2.81%. Disimpulkan pentingnya membandingkan hasil yang telah direncanakan dengan hasil yang dicapai, untuk mengetahui tingkat ke efektifan dari suatu fungsi instansi.

Tabel 4.32
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Kebijakan memihak kepada kepentingan publik."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	5	11	55	17,19%
2	Sesuai	4	45	180	56,25%
3	Biasa Saja	3	7	21	6,56%
4	Tidak Sesuai	2	1	2	0,63%
5	Sangat Tidak Sesuai	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**258**	**80,63%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Kategori Manakah yang menunjukan kenijakan yang memihak kepada kepentingan publik”. Mayoritas responden sebanyak 45 orang atau 56.25% adalah responden yang menjawab “Sesuai”, dan minoritas responden yang menjawab “Tidak Sesuai” yaitu sebanyak 1 orang atau 0.63%. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan publik.

Tabel 4.33
Tanggapan Responden Tentang Item Penyataan
"Dalam konteks kinerja birokrasi publik, tingkat keadilan yang diberikan kepada masyarakat."

No.	Alternatif Jawaban	Skor (xi)	Frekuensi (f_i)	$x_i \cdot f_i$	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	9	45	14,06%
2	Baik	4	47	188	58,75%
3	Biasa Saja	3	8	24	7,50%
4	Tidak Baik	2	0	0	0,00%
5	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0,00%
Total			**64**	**257**	**80,31%**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jawaban responden tentang item pernyataan “Dalam konteks kinerja birokrasi publik, tingkat keadilan yang diberikan kepada masyarakat.”. Mayoritas responden sebanyak 47 orang atau 73.44% adalah responden yang menjawab “Baik”, dan minoritas responden yang menjawab “Biasa Saja” yaitu sebanyak 8 orang atau 12.50%. Disimpulkan bahwa tingkat keadilan yang diberikan kepada masyarakat telah barjalan dengan baik.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat partisipasi penganggaran dan pengawasan intern maka kinerja instansi pemerintah daerah juga akan semakin baik, berdasarkan dugaan tersebut maka pada penelitian ini akan diuji pengaruh partisipasi penganggaran dan pengawasan intern terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah dengan menggunakan analisis korelasi dan koefisien determinasi.

4.1.4.1 Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Analisis korelasi *Pearson Product Moment* adalah suatu analisis yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua atau lebih variabel bila data variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari masing-masing variabel adalah sama. Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat *output* hasil koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 4.35
Nilai Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626[a]	.392	.372	3.07124

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern (X2), Partisipasi Penganggaran (X1)

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,626. Nilai tersebut kemudian diintepretasikan berdasarkan kriteria Guilford sebagai berikut:

Tabel 4.36
Koefisien Korelasi dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber : Sugiyono, 2009:231

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi yang disajikan di atas, maka koefisien korelasi sebesar 0,626 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.

4.1.4.2 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Setelah diketahui nilai R sebesar 0,626, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.37
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626[a]	.392	.372	3.07124

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern (X2), Partisipasi Penganggaran (X1)

KD = $R^2 \times 100\%$

= $(0{,}626)^2 \times 100\%$

= 39,18%

Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 39,18% yang menunjukkan arti bahwa Partisipasi Penganggaran (X_1) dan Pengawasan Intern (X_2) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 39,18% terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y). Sedangkan sisanya sebesar 60,82% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui persentase pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y), maka digunakan rumus Koefisien Beta × Zero-order, dengan hasil sebgai berikut :

Tabel 4.38

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Correlations		
		B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	9.770	2.291				
	Partisipasi Penganggaran (X1)	.020	.112	.020	.335	.022	.018
	Pengawasan Intern (X2)	.574	.108	.615	.626	.561	.529

a. Dependent Variable: Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Variabel X_1 = 0,020 x 0,335 = 0,006 = 0,68%
2. Variabel X_2 = 0,615 × 0,626 = 0,385 = 38,49%

1. Pengaruh Variabel (X_1) terhadap Variabel (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat diketahui bahwa variabel Partisipasi Penganggaran (X_1) memiliki pengaruh terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu dengan nilai sebesar 0,68%.

2. Pengaruh Variabel (X_2) terhadap Variabel (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat diketahui bahwa variabel Pengawasan Intern (X_2) memiliki pengaruh terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu dengan nilai sebesar 38,49%.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan adalah suatu pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama atau simultan variabel bebas (independen) berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

Hipotesis:

H_0 : Partisipasi Penganggaran (X_1) dan Pengawasan Intern (X_2) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y);

H_a : Partisipasi Penganggaran (X_1) dan Pengawasan Intern (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%

Kriteria Pengujian :

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.39
Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	370.609	2	185.305	19.645	.000[a]
	Residual	575.382	61	9.432		
	Total	945.991	63			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern (X2), Partisipasi Penganggaran (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah(Y)

Berdasarkan *output* di atas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 19,645 dengan *p-value* (sig) 0,000. Dengan α=0,05 serta derajat kebebasan v_1 = 2 dan v_2 = 61 (n-(k+1)), maka di dapat F_{tabel} 3,148. Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (19,645 > 3,148) maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Hasil perhitungan pengujian parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.40
Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.770	2.291		4.265	.000
	Partisipasi Penganggaran (X1)	.020	.112	.020	.175	.861
	Pengawasan Intern (X2)	.574	.108	.615	5.296	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

a). Pengujian hipotesis parsial variabel Partisipasi Penganggaran (X_1)

H_0 : Partisipasi Penganggaran (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

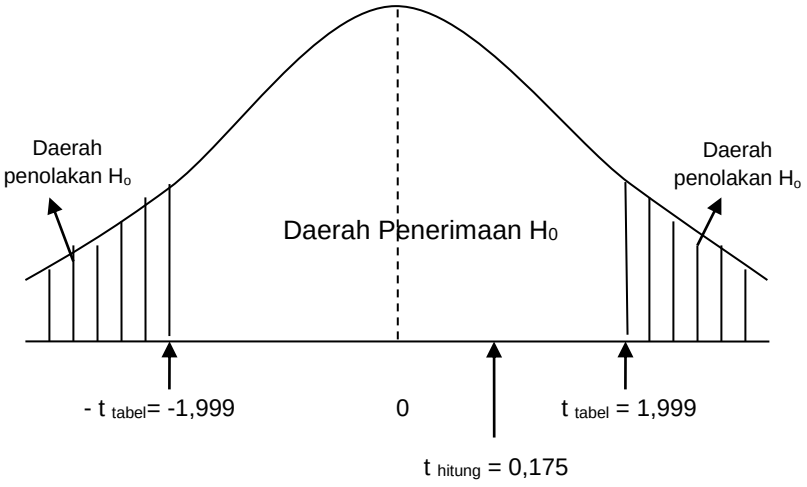
H_a : Partisipasi Penganggaran (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

Kriteria pengujian:

Tolak H_0 dan terima H_a jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$.

Terima H_0 dan tolak H_a jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 62 (n – 2) didapat nilai t_{tabel} 1,999.



Gambar 4.4 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Partisipasi Penganggaran (X_1)

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Partisipasi Penganggaran (X_1) sebesar 0,175 dan t_{tabel} 1,999. Dikarenakan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Partisipasi Penganggaran (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap inerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

b). Pengujian hipotesis parsial variabel Pengawasan Intern (X_2)

H_0 : Pengawasan Intern (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

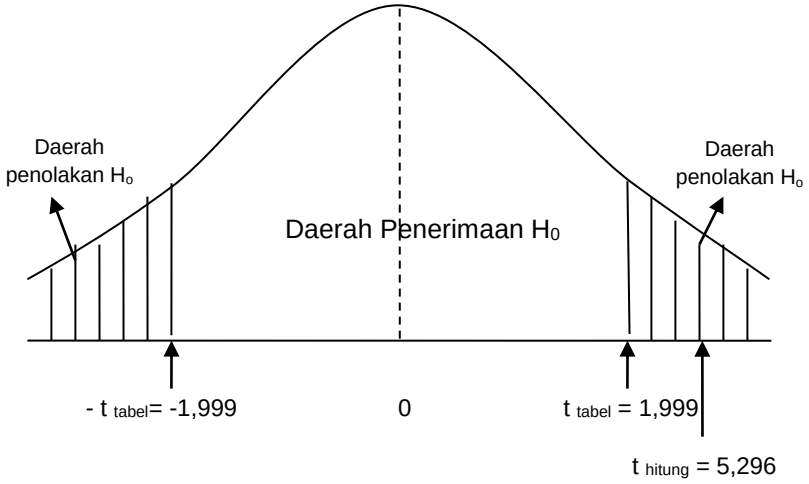
H_a : Pengawasan Intern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)

Kriteria pengujian:

Tolak H_0 dan terima H_a jika $-t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$.

Terima H_0 dan tolak H_a jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 62 (n – 2) didapat nilai t_{tabel} 1,999.



Gambar 4.5 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Pengawasan Intern (X_2)

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Pengawasan Intern (X_2) sebesar 5,296 dan t_{tabel} 1,999. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pengawasan Intern (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

4.2 Pembahasan

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penganggaran dan pengawasan intern berpengaruh positif terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah, artinya semakin tinggi tingkat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan maka

akan meningkatkan kinerja unit satuan kerja perangkat daerah yang ada dilingkungan pemerintah kabupaten pandeglang.

4.2.1 Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi maka partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah dengan nilai sebesar 0,68%. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Darlis (2002:35) yang mengungkapkan bahwa :

> "Partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama di antara para manajer, dalam kata lain partisipasi mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi".

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Misni Erwati (2009) dimana adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah yang menunjukan semakin tinggi tingkat keterlibatan aparatur pemerintah dalam proses partisipasi penganggaran maka semakin baik pula hasil kinerjanya. Secara indikator pada variabel partisipasi penganggaran terdapat satu indikator yang yang berkategori cukup baik yaitu pengaruh dalam penentuan besaran anggaran, hal ini sejalan dengan masalah yang ada yaitu ditemukannya kesalahan dalam tahap perencanaan anggaran dimana dalam setiap perencanaan dan pengelolaan anggaran di instansi pemerintaha jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah sehingga pegawai tidak

terpacu untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap penyusunan anggaran dan tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam penentuan besaran anggaran akhir.

4.2.2 Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah, dan hasil perhitungan koefisien determinasi didapat nilai pengaruh sebesar 38,49%, artinya jika pengawasan yang dilakukan semakin baik maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah, hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2011:188) sebagai berikut :

> "Pengawasan intern merupakan suatu pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dan memperlancar pelaksanaan tugas, dalam hal ini pengawasan intern harus dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik".

Kemudian hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggi Fawzi (2009) Dimana hasilnya menyatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari teori dan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat menjadi jaminan bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai. Adapun indikator yang termasuk dalam kategori baik tetapi nilai persentasinyta paling rendah yaitu menjaga kekayaan organisasi, hal ini sejalan dengan masalah yang ada yaitu masih lemahnya pengawasan internal di instansi pemerintah yang mengakibatkan masih adanya

penyelewengan dana organisasi, maka dari itu pengawasan intern yang efektif dan kontinyu yang dilakukan disetiap instansi pemerintah dapat menjamin kinerjanya berjalan dengan baik.

4.2.3 Pengaruh Partisipasi penganggaran dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Secara keseluruhan berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi maka didapat nilai pengaruh yang diberikan sebesar 39,18%, yang artinya partisipasi penganggaran dan pengawasan intern secara bersama-sama atau memberikan pengaruh simultan terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah, sedangkan sisanya sebesar 60,82% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini, dan berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa partisipasi penganggaran dan pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah. Rendahnya kinerja di instansi pemerintah dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran dan pengawasan intern yang dilakukan, maka dari itu jika tingkat partisipasi penganggaran dan pengawasan intern yang dilakukan berjalan dengan baik akan meningkatkan kinerja dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.